

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) OLEH
DINAS SOSIAL (STUDI TERHADAP SUKU SAKAI DI DESA KESUMBO
AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

BOY ARDIAN

187310337

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Boy Ardian
NPM : 187310337
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh
Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo
Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Boy Ardian
NPM : 187310337
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh
Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo
Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-ilmu Sosial.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP., M. Si

Septa Juliana, S. Sos., M. Si

Anggota

Dr. Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan 1

Indra Safri, S. Sos., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Boy Ardian
NPM : 187310337
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh
Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo
Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

A.n Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP., M. Si

Septa Juliana, S. Sos., M. Si

Turut Menyetujui,

Mengetahui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Wakil Dekan 1

Ketua

Indra Safri, S. Sos., M. Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M. Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”**. Untuk memenuhi salah satu syarat guna gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islasm Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M. Si sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan serta ilmu pengetahuan yang sangat membantu dalam penyusunan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis.

7. Terimakasih kepada kedua orang tua, adik-adik yang selalu memberikan do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penuls, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak;anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
8. Terimakasih kepada para senior-senior khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dan memberikan ilmu serta pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat termotivasi.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan yang selalu saling support dan saling membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan.

Wassakamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Penulis

Boy Ardian

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian	16
BAB II (STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR)	17
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Pemerintahan	17
2. Ilmu Pemerintahan	19
3. Fungsi Pemerintahan	20
4. Asas-Asas Pemerintahan	22
5. Konsep Pemberdayaan	24
6. Komunitas Adat Terpencil (KAT)	28
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	36
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel	39
BAB III (METODE PENELITIAN)	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	41
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	45

H. Rencana Sistematika Laporan	46
BAB IV (DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN)	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	48
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis	48
2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.....	49
3. Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis	50
4. Luas dan Wilayah Kabupaten Bengkalis	50
B. Gambaran Umum Desa Kesumbo Ampai.....	51
1. Sejarah Singkat Desa Kesumbo Ampai	51
2. Visi dan Misi Desa Kesumbo Ampai.....	52
3. Kondisi Geografis Desa Kesumbo Ampai	52
4. Keadaan Penduduk di Desa Kesumbo Ampai	53
5. Sosial Budaya Masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai.....	55
6. Sarana dan Prasarana di Desa Kesumbo Ampai	57
7. Struktur Organisasi Kantor Desa Kesumbo Ampai	58
BAB V (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN).....	59
A. Identifikasi Informan Penelitian.....	59
B. Hasil Penelitian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	61
BAB VI (PENUTUP)	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka.....	80
Lampiran	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persebaran KAT di Provinsi Riau Tahun 2016.....	9
Tabel 1.2 Persebaran KAT Kabupaten Bengkalis Tahun 2018	10
Tabel 1.3 Persebaran KAT Kecamatan Bathin Solapan	11
Tabel 1.4 Data Bantuan Yang Didapatkan Masyarakat Di Desa Kesumbo Ampai 2020.....	12
Tabel 1.5 Data Bantuan Yang Didapatkan Masyarakat Di Desa Kesumbo Ampai 2021.....	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang relatif sama.....	34
Tabel 2.2 Operasional Variabel Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	39
Tabel 3.1 Nama-nama Informan	42
Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	45
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Umur	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Suku	54
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana yang Ada di Kantor Desa Kesumbo Ampai	57
Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	59
Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61

Tabel 5.4 Hasil Observasi Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Berbasis Lokal	64
Tabel 5.5 Hasil Observasi Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan.....	67
Tabel 5.6 Hasil Observasi Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Berbasis Kemitraan.....	70
Tabel 5.7 Hasil Observasi Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Secara Holistik.....	73
Tabel 5.8 Hasil Observasi Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Berkelanjutan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial.....	36
Gambar 4.1 Peta Desa Kesumbo Ampai.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Kesumbo Ampai	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1 : Gambar 1. Gapura Suku Sakai Ketika Memasuki Daerah Desa Kesumbo Ampai	85
2 : Gambar 2. Rumah Adat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai	85
3 : Gambar 3. Kantor Desa Kesumbo Ampai	85
4 : Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Nasir (Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai).....	86
5 : Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Rasyid dan Saudara Roso (Masyarakat).....	86
6 : Gambar 6. Wawancara bersama Bapak Indra Muslahir (Sekertaris Desa Kesumbo Ampai)	86
7 : Gambar 7. Fasilitas yang ada di Desa Kesumbo Ampai.....	87
8 : Gambar 8. Contoh bantuan Rumah Layak Huni (RLH).....	87
9 : Daftar Pertanyaan Wawancara Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	88
10: SK Dekan FISIPOL UIR No.0230/UIR-Fs/Kpts/2022 tentang penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi a.n Boy Ardian.....	90
11: Surat Rekomendasi PraRiset No.4176/E-UIR/27-Fs/2021 dari Universitas Islam Riau.....	91
12: Surat Rekomendasi No.503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45905 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/PraRiset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	92
13: Surat Rekomendasi No.423.6/KESOSBUD-BS/01 dari Kantor Camat Kecamatan Bathin Solapan	93
14: Surat Keterangan Plagiasi Skripsi No.1208/A-UIR/5-Fs/2022 Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	94

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Boy Ardian
NPM : 187310337
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Atas makna yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini adalah beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Penelitian ini adalah benar hasil dari karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan di terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan bulir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Penulis

Boy Ardian

**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) OLEH
DINAS SOSIAL (STUDI TERHADAP SUKU SAKAI DI DESA KESUMBO
AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS)**

ABSTRAK

Boy Ardian

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Oleh sebab itu, tugas dan fungsi Dinas sosial adalah menunjang terlaksananya kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dengan baik. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial (studi terhadap Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) dan untuk mengetahui apa saja program yang terkendala dalam pelaksanaannya. Adapun tipe penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling*, dengan pertimbangan informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah topik penelitian yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum program pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan sudah efektif walaupun masih terdapat beberapa program yang tidak terlaksana dan perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) sudah sesuai dengan perencanaan dan kesesuaian waktu pelaksanaan sudah cukup baik.

Kata kunci: Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Program Bantuan

**EMPOWERMENT OF REMOTE TRADITIONAL COMMUNITIES (RTC)
BY THE SOCIAL SERVICES (STUDY ON THE SAKAI TRIBE IN
KESUMBO VILLAGE TO BATHIN SOLAPAN DISTRICT, BENGKALIS
REGENCY)**

ABSTRACT
Boy Ardian

The social service is an element of implementing government affairs which is the authority of the region. The social service office has the task of assisting the Regent in carrying out government affairs which are the authority of the Region and the auxiliary tasks assigned to the Region in the social sector. Therefore, the task and function of the Social Service is to support the implementation of policies in the field of social empowerment properly. Empowerment is a series of activities to strengthen the power or empowerment of weak groups in society, including individuals who experience poverty problems. The purpose of this study was to describe the empowerment of Remote Traditional Communities (RTC) by the Social Service (a study of the Sakai Tribe in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency) and to find out what programs were constrained in its implementation. As for this type of research using qualitative methods. Determination of informants in this study using the purpose sampling method, with consideration of the appointed informants know and understand the problem of the research topic needed. The results of this study indicate that in general the community empowerment program for Remote Traditional Communities (RTC) in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District has been effective, although there are still some programs that are not implemented and need to be improved or improved. This can be seen from the implementation of the Remote Traditional Community (RTC) community empowerment program that is in accordance with the planning and the timing of implementation is quite good.

**Keywords: Empowerment, Remote Traditional Communities (RTC),
Assistance Program**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia memiliki 34 Provinsi yang mana disetiap provinsi memiliki suku adat asli yang ada didaerah masing-masing yang turun-temurun dari nenek moyang. Kabupaten Bengkalis mempunyai beberapa suku terasing yaitu Suku Sakai, Suku Akit dan Suku Asli. Suku Sakai tersebar di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bathin Solapan. Suku Sakai biasanya tinggal di pemukiman sederhana. Di rumah tersebut dihuni oleh beberapa keluarga inti dengan seorang pemimpin. Pemimpin di dalam pemukiman tersebut biasanya merupakan seorang tokoh senior yang disebut dengan istilah *batin*. Dalam mengambil suatu keputusan, masyarakat suku sakai biasanya diadakan suatu musyawarah

untuk mencapai mufakat. Suku Sakai umumnya memiliki ciri-ciri fisik berkulit cokelat agak gelap dengan rambut keriting atau berombak. Suku Akit tersebar di Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara. Suku ini disebut sebagai orang Akit karena mereka kerap menggunakan rakit untuk berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Suku akit memiliki ciri-ciri hampir sama dengan suku sakai yaitu berkulit gelap dan berambut gelombang. Sedangkan Suku Asli tersebar di sekitar Pulau Bengkalis pada Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Suku Asli, mereka adalah orang yang pertama tinggal di beberapa wilayah Pulau Bengkalis karena tidak ada di jumpai orang lain selain mereka, sehingga mereka menanamkan dengan “Suku Asli”, untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan suku pertama sekali mendiami wilayah Pulau Bengkalis.

Saat ini belum ada kegiatan pengembangan yang mendukung kemajuan masyarakat suku sakai, sehingga suku ini dianggap sebagai suku terasing, orang sakai umumnya bermukim di beberapa lokasi, seperti di daerah Kandis, Balai Pungut, Kota Kapur, Minas, Duri, sekitar sungai siak, dan bagian hulu dari Sungai Apit. Suku Sakai biasanya tinggal di pondok sederhana yang mudah dibongkar, sehingga mereka dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat sewaktu-waktu (nomaden). Pondok atau rumah tersebut dihuni oleh beberapa keluarga inti dengan seorang pemimpin. Pemimpin di dalam pemukiman tersebut biasanya merupakan seorang tokoh senior yang disebut istilah batin. Dalam mengambil suatu keputusan, masyarakat suku sakai biasanya diadakan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Arti dari nama Sakai berasal dari huruf awal kata Sungai, Anak, Kampung, Ikan. Maknanya adalah mereka anak-anak negeri yang hidup disekitar sungai dan mencari ikan penghidupan dari hasil kekayaan yang ada disungai berupa ikan. Julukan ini diprotes oleh masyarakat suku sakai yang sudah maju, karena hal ini berkonotasi pada hal yang tidak kuno dan bodoh,serta tidak mengikuti kemajuan jaman, sedangkan kenyataan ini, masyarakat sakai sudah tidak lagi banyak yang masih melakukan tradisi hidup nomadennya, karena wilayah hutan yang semakin sempit di daerah Riau.

Rumah Adat Suku Sakai menjadi bagian penting bagi sebuah suku, karena rumah adat menjadi simbol pelestarian kebudayaan, termasuk pada Suku Sakai. Rumah adat dari suku ini berjenis rumah panggung yang awalnya terbuat dari kayu pohon ulin. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini rumah adat Suku Sakai telah terbuat dari bahan besi sebab kayu ulin saat ini sudah mulai langka. Suku Sakai memiliki hukum yang tegas mengenai beberapa hal, misalnya hukum mengenai penebangan pohon. Masyarakat sakai yang diketahui menebang pohon ditanah hutan ulayat akan diberi hukuman berupa denda uang yang setara dengan perhiasan emas dalam ukuran berat tertentu. Semakin tua usia pohon yang ditebang maka denda yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Sedangkan ketentuan mengenai besar denda yang harus dibayar oleh penebang pohon akan ditentukan pada saat dilaksanakan rapat adat.

Namun jika penebang pohon di wilayah kewenangan (ulayat) adalah orang-orang di luar Suku Sakai, maka orang tersebut akan diusir dan bisa

saja dibunuh. Oleh karena itu, hingga sekarang tidak ada seorang pun yang berani menebang pohon di hutan ulayat karena adanya sanksi dari hukum adat sakai yang sangat tegas. Hutan ulayat merupakan hutan adat warisan dari suku sakai yang saat ini luasnya semakin mengecil. Adanya hukum adat yang bersifat tegas mengenai penebangan pohon sebenarnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh suku sakai untuk mempertahankan sebuah wilayah tertentu atau tanah warisan tersebut. Hukum adat sekaligus menjadi cara untuk mengurangi pengurangan luas lahan. Umumnya lahan hutan ulayat tersebut diambil untuk kegiatan perkebunan sawit dan kegiatan industri lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya atau memperkuat sebuah potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat. Tujuan Pemberdayaan bagi masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Payne (1997:268) menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya dan saling membantu belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil gunanya untuk tercapai tujuan yang lebih besar.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan sosial

budaya, miskin, dan rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk:

1. Perlindungan hak sebagai warga negara
2. Pemenuhan kebutuhan dasar
3. Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas
4. Kemandirian sebagai warga negara

Kriteria Komunitas Adat Terpencil Meliputi:

1. Keterbatasan akses pelayanan social dasar
2. Tertutup homogen dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam
3. Marjinal di pedesaan dan perkotaan
4. Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar dan terpencil

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa Kesumbo Ampai adalah salah satu desa di kecamatan Bathin Solapan, Bathin Solapan adalah sebuah kecamatan yang berada dikabupaten bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan Bathin Solapan merupakan pemekaran dari kecamatan induk yaitu kecamatan Mandau pada tahun 2017. Ibu kota kecamatan ini berada di desa sebangar. Bathin Solapan berbatasan langsung dengan Kota Dumai & Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di kecamatan Bathin Solapan sebanyak 97,420 jiwa, dengan kepadatan penduduk 113,86 jiwa/km². Sementara penduduk asli kecamatan ini adalah

suku Melayu dan juga Sakai. Suku pendatang juga banyak di kecamatan Bathin Solapan, Khususnya suku Batak Toba dan juga Minangkabau, dan sebagian lagi suku Nias, Tionghoa, Aceh, dan lainnya, sehingga kecamatan ini cukup beragam berdasarkan SARA (Suku Agama Rasa dan Adat Istiadat).

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonstrasi, dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan sendiri terdiri atas urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.

1. Urusan Pemerintahan Absolut. Umumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama
2. Urusan Pemerintahan Konkuren. Merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu:

a. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas:

- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain, pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan lain-lain.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan, dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penerapan ketenagakerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum.

a. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

c. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

e. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Tugas Dan Fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jalan Antara, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sosial; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara umum Komunitas Adat Terpencil di desa Kesumbo Ampai sudah semakin modern dan sudah mulai berbaur dengan dunia luar. Perhatian dinas sosial dan aksesibilitas terhadap fasilitas publik yang memungkinkan mereka untuk melakukan transformasi hidup ke arah yang lebih baik sudah mulai membaik. Aksesibilitas terhadap dunia luar yang menyebabkan masyarakat KAT mulai maju dalam berbagai segi kehidupan seperti kestabilan ekonomi, tingkat kesehatan yang mulai membaik, tingkat Pendidikan dan lainnya. Kondisi ini terus berlanjut, sebagai akibat mulai optimalnya peran pemerintah dalam merespon persoalan ini.

Tabel 1.1 Persebaran KAT di Provinsi Riau Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Suku	Provinsi	
			KK	Jiwa
1	Bengkalis	Asli	1,525	6,674
		Akit	1,632	9,568
		Sakai	2,294	9,953
2	Indragiri Hulu	Talang Mamak	3,441	16,334
3	Indragiri Hilir	Laut	1,010	4,196
4	Rokan Hulu	Bonai	1,916	9,569
5	Pelalawan	Akit	324	1,533
6	Siak	Akit	125	500
7	Rokan Hilir	Bonai	200	684
8	Meranti	Akit	1,419	5,719
Jumlah			13,886	64,730

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau 2016

Keberadaan komunitas adat terpencil di kabupaten Bengkalis tersebar hampir di semua kecamatan. Dari data yang diperoleh bahwa masyarakat KAT tersebar di 36 desa dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dari seluruh masyarakat KAT yang ada di kabupaten Bengkalis, terdapat dari 3 suku yang dikategorikan sebagai Komunitas Adat Terpencil yaitu suku sakai, suku asli, dan suku akit. Mereka hidup secara tradisional dan berkumpul pada satu wilayah. Keadaan suku sakai di desa kesumbo sampai masih terdapat banyak permasalahan sosial yang menjadikan masyarakat suku sakai tersebut sulit untuk memenuhi kehidupan yang layak.

Tabel 1.2 Persebaran KAT Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No	Kecamatan	Suku	Jumlah KAT (KK)
1	Bengkalis	Asli	1.012
2	Bantan	Asli	1.150
3	Bathin Solapan	Sakai	825
4	Bandar Laksamana	Asli	1.160
5	Bukit Batu	Asli	2.747
6	Mandau	Sakai	856
7	Pinggir	Sakai	780
8	Talang Muandau	Sakai	252
9	Rupat	Akit	350
10	Rupat Utara	Akit	226
11	Siak Kecil	Asli	3.532
Jumlah			12.890 KK

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Salah satu Dinas yang membidangi urusan sosial ini tepatnya urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar adalah Dinas Sosial pemerintahan kabupaten Bengkalis, Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam bidang Pemberdayaan Sosial terdapat pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.3 Persebaran KAT Kecamatan Bathin Solapan

No	Desa	Suku	Jumlah (KK)
1	Air Kulim	-	-
2	Balai Makam	-	-
6	Bumbang	Sakai	60
7	Kesumbo Ampai	Sakai	216
8	Pamesi	-	-
9	Pematang Obo	-	-
10	Petani	Sakai	112
11	Sebangar	Sakai	133
12	Simpang Padang	-	-
13	Tambusai Batang Dui	-	-
Jumlah			521 KK

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Di Kecamatan Bathin Solapan terdapat 13 Desa. Namun dari data yang diperoleh dari 13 Desa tersebut hanya 4 Desa yang terdapat Suku Sakai, yaitu Desa Bumbang, Desa Kesumbo Ampai, Desa Petani dan Desa Sebangar. Dari data yang diperoleh suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai berjumlah 216 KK dan tersebar di RT. 001 RW. 003 dan RT.002 RW. 003. Di RT. 001 suku sakai berjumlah 107 KK sedangkan di RT. 002 berjumlah 83 KK. Beberapa bantuan dari pihak pemerintah dan juga swasta sudah mulai membaik diberikan kepada masyarakat suku sakai di Desa Kesumbo Ampai. Bantuan tersebut berupa pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi.

Tabel 1.3 Data Bantuan Yang Didapatkan Masyarakat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai 2020

Jenis Bantuan	Instansi	Jumlah yang mendapatkan bantuan	Bantuan yang didapatkan
Pendidikan	PT. Murini	SD: 74 Orang SMP: 21 Orang SMA: 24 Orang Mahasiswa: 9 Orang	SD: Rp. 120.000 SMP: Rp. 150.000 SMA: Rp. 160.000 Mahasiswa: Rp. 200.000
Ekonomi	Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	162 KK	BLT (Uang Tunai) Rp. 600.000/KK
	PT. Kelapa Sawit (PT. Isa)	193 KK	<ul style="list-style-type: none"> Beras ukuran 10 kg Minyak makan ukuran 1 liter
Kesehatan	Puskesmas	31 orang (Balita dan anak-anak)	Imunisasi
		7 orang (Ibu hamil)	<ul style="list-style-type: none"> Cek kesehatan Pemberian makanan bergizi, susu dan vitamin.

Sumber: Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan dari data yang diperoleh suku sakai di Desa Kesumbo Ampai telah menerima bantuan dari tahun 2020 hingga saat ini. Setiap tahunnya bantuan yang diberikan mengalami peningkatan. Tidak hanya melalui program pemerintah Kabupaten Bengkalis, tetapi pihak swasta juga memberikan perhatian pada pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) terkhusus Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai. Berikut data bantuan yang diperoleh masyarakat suku sakai di Desa Kesumbo Ampai pada tahun 2021.

Tabel 1.4 Data Bantuan Yang Didapatkan Masyarakat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai 2021

Jenis Bantuan	Instansi	Jumlah yang mendapatkan bantuan	Bantuan yang didapatkan
Pendidikan	PT. Murini	SD: 85 Orang SMP: 29 Orang SMA: 32 Orang Mahasiswa: 15 Orang	SD: Rp. 120.000 SMP: Rp. 150.000 SMA: Rp. 160.000 Mahasiswa: Rp. 200.000
Ekonomi	Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	182 KK	BLT (Uang Tunai) Rp. 600.000/KK
	PT. Kelapa Sawit (PT. Isa)	216 KK	<ul style="list-style-type: none"> Beras ukuran 10 kg Minyak makan ukuran 1 liter
Kesehatan	Puskesmas	40 orang (Balita dan anak-anak)	Imunisasi
		10 orang (Ibu hamil)	<ul style="list-style-type: none"> Cek kesehatan Pemberian makanan bergizi, susu dan vitamin.

Sumber: Olahan Peneliti 2021

Suku sakai yang ada di Kecamatan Bathin Solapan khususnya di Desa Kesumbo ampai sudah diakui 60% karena programnya sudah mulai

tertata dari pada suku sakai di tempat lainnya. Di dalam Desa juga sudah mulai dibangun sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMK dan juga MDA. Bantuan dari berbagai pihak pun sudah mulai mengalir merata kepada masyarakat Desa dan saat ini suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai sudah mulai modern. Walaupun ekonomi di luar Desa melemah, mereka dapat memanfaatkan lahan yang ada di dalam desa untuk bertani ataupun berkebun. Dari data yang diperoleh, suku sakai yang paling aman untuk hidup hanya di Desa kesumbo Ampai.

Bantuan BLT yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dimulai sejak tahun 2019 karena fenomena Covid-19. Pada tahun 2019 kebawah belum ada bantuan ekonomi yang diberikan Pemerintah tetapi ada sedikit bantuan yang diberikan oleh pihak Swasta. Pada tahun 2013 terdapat bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang sempat terhenti pada tahun 2019 – 2021 dan dikabarkan akan dilaksanakan kembali pada akhir tahun 2022. Terdapat 4 unit rumah yang mendapatkan Program Rumah Layak Huni (RLH) yang diberikan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan.

Saya memilih Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebagai objek penelitian saya karena Suku sakai di daerah ini kebudayaan dan adat istiadatnya masih terlestarikan. Selain itu, kehidupan masyarakat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai masih berkelompok sesama suku sakai lainnya.

Dari penjelasan di atas terdapat fenomena terkait Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah:

- Perekonomian yang mulai meningkat terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang di kemukakan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

Bagaimana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial (Studi terhadap Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Akademis, sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perpustakaan sehingga dapat menambah bahan kajian.
- b. Aspek Teoritis, penelitian ini merupakan salah satu pengembangan teori-teori terdahulu sehingga menambah pengetahuan baru dalam bidang ilmu pemerintahan.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam kebijakan pemerintah.
- d. Aspek Praktis, sebagai pengetahuan dan masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Bengkalis.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Haboddin (2015: 4-5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan lembaga negara. Yang melaksanakan tugas dan kewenangan adalah Lembaga eksekutif sebagai eksekutor kebijakan yang telah diputuskan Lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dalam konteks ini meliputi aparat birokrasi maupun para politisi, dan negarawan yang menjadi pucuk pemimpin Lembaga negara.

Menurut Fathur Rahman (2018: 2) pemerintahan secara etimologis berasal dari kata Yunani, 'kubernan' atau *nahkoda kapal*. Artinya, menatap ke depan [Surbakti, 2002; 167]. Sedangkan pendapat lain, mengatakan pemerintahan dari kata 'perintah'. Kata perintah memiliki empat unsur yakni *pertama*, ada dua pihak yang saling terikat. *Kedua*, kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. *Ketiga*, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. *Empat*, pihak yang diperintah memiliki ketaatan [Martini dan Juwono, 2015; 17].

Dari istilah tersebut bisa disimpulkan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan kedepan. Pemerintah selalu diorientasikan pada kemajuan sebuah negara bangsa. Sebagaimana dikatakan Amien Rais dkk yang mendefinisikan pemerintahan adalah

sekelompok orang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan [Rais dkk, 1985; 189].

Pemerintah menurut Ndraha (2003: 6) adalah badan atau instansi yang memiliki wewenang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat baik dalam pelayanan sipil maupun lainnya.

Menurut Sedarmayanti (2004: 9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Iver dalam Syafiie (2007: 22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu diperintah. Sedangkan menurut Ndraha (2003:6) menegaskan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewajiban untuk melayani pelayanan sipil ataupun jasa-publik terhadap masyarakat serta memiliki kewenangan.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya

masyarakat. Sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu negara (Munaf, 2016:47).

Menurut Kansil (2003:189) agar keterlaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu memperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat;
- b. Prinsip koordinasi;
- c. Tertulis;
- d. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan;
- e. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

2. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (2003:7) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan,(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni katena banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syarat untuk dipelajari dan diajarkan,

memiliki objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematik dan spesifik (Syafiie, 2007:11).

Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2007:20).

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2007:21) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemerintahan umum disusun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Rohayatin (2021: 12) mengatakan bahwa objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah, hubungan yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar Lembaga serta hubungan antar departemen) sudah barang tentu termasuk di dalamnya pembahasan *output* pemerintah seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas/kegiatan, gejala/perbuatan, dan peristiwa-peristiwa pemerintah serta kelompok elit pemerintahan yang berkuasa.

3. Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid (1996:48) menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Sedangkan Ndraha (2003:76) mengemukakan bahwa fungsi pemerintah terbagi dalam 2 macam fungsi yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang-diperintah. Kemudian fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan social yang-diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang-diperintah.

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Ndraha (2003:75-76) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti empowering dan dalam arti enabling. Dalam arti empowering, pemberdayaan yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya. Sedangkan dalam arti enabling, pemberdayaan yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Kemudian berkaitan dengan fungsi pembangunan, Ndraha (2003:75) berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi ad interim, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Konsep development hanya dikenakan pada “Dunia Ketiga”, dikelola menurut

development administration yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), maka tidak ada pembangunan.

4. Asas-Asas Pemerintahan

Asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah (Ndraha, 2003:681).

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Sebab begitu nilai-nilai etika, filsafat, agama dijadikan hukum positif maka nilai-nilai tersebut terputus dari sumbernya dan dengan mudah dapat dijadikan alat politik praktis dan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menekan pihak lain atau pihak yang diperintah.

b. Asas Keahlian (Fungsional)

Asas keahlian atau fungsional adalah suatu asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional. Penerapan asas keahlian

tersebut dapat dilihat pada pembentukan departemen-departemen pada level pemerintah pusat dan dinas-dinas pada level pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan asas keahlian dapat didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian tugas-tugas yang berkaitan dengan keahlian tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

c. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masih berlaku sampai saat ini adalah Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Konsekuensi daripada ketiga asas tersebut maka diadakan sebagai berikut:

1. Otonomi daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonom yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wilayah administratif, yaitu akibat dari adanya asas dekonsentrasi.

5. Konsep Pemberdayaan

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Mardikanto (2015: 49) serupa konseptual, pemberdayaan masyarakat ialah usaha yang bertujuan mengembangkan kedudukan dan derajat setiap bagian penduduk bahwa pada saat ini tak mampu untuk membebaskan dari diri jeratan kesengsaraan dan ketertinggalan zaman. Pemberdayaan masyarakat bagaikan sebuah rencana, saat ini sudah banyak tercapai bahkan sudah meningkat pada sastra bangsa eropa, maksudnya memberdayakan ialah membuat penduduk menjadi mampu dan mandiri. Sementara itu berdasarkan Sumodiningrat (1999), yaitu pemberdayaan masyarakat adalah usaha yang bertujuan membuat penduduk menjadi mandiri melalui pelaksanaan kemampuan yang masyarakat itu miliki.

Pemberdayaan mengarah kepada keahlian individu, spesifiknya golongan responsif juga rapuh akibatnya mempunyai energi atau keahlian pada mencakup keperluan pokoknya oleh karena itu mempunyai keleluasaan, maksudnya tak hanya leluasa mengungkapkan pandangan, selain itu lepas dari kekurangan bahan pangan, lepas dari kurang pandai bahkan lepas dari kesengsaraan; mencapai bahan-bahan bermanfaat yang dapat terjadi pada golongan sehingga terjadinya peningkatan pendapat dan mendapat benda-benda dan jasa-jasa yang golongan itu butuhkan.

Pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas untuk meningkatkan otoritas atau keberdayaan golongan bawah pada penduduk, terhitung pribadi-pribadi yang menghadapi perkara kekurangan ekonomi. Apabila ditinjau sebagai poin penting oleh karena itu pemberdayaan menunjukkan kepada situasi ataupun akibat yang hendak diraih oleh suatu perbuatan sosial, maka perbuatan sosial itu adalah penduduk yang berkemampuan, memegang otoritas maupun memiliki wawasan bahkan potensi pada mencukupi keperluan pokoknya (Edi, 210: 58-60).

Menurut Damanik (2019: 4-5) tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat yaitu keinginan masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, dan masyarakat juga diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya.

b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mhathews mengatakan (pada Mardikanto, 2015: 105) bahwa prinsip ialah sebuah ungkapan mengenai ketentuan yang diwujudkan patokan pada penentuan ketetapan bahkan mengadakan aktivitas dengan teratur. Maka dari ini, prinsip bakal valid dan akan disahkan dengan umum dan sudah dipercaya keabsahannya dari bermacam pandangan pada situasi yang

beraneka ragam. Maka dari itu prinsip bisa dibuat bagaikan acuan utama yang valid untuk perwujudan aktivitas yang akan dilakukan. Berdasarkan dari berbagai pandangan pemberdayaan menjadi suatu sistem pendidikan, oleh karena itu pemberdayaan mempunyai prinsip-prinsip dibawah ini:

- a) Mengerjakan, maksudnya adalah masalah pemberdayaan wajib benar-benar mengikutsertakan penduduk agar mengupayakan sesuatu, sebab dengan “mengerjakan” masyarakat akan merasakan prosedur menuntut ilmu baik dengan menerapkan akal, pandangan bahkan keahliannya yang tak terlupakan pada jangka periode yang tak singkat.
- b) Akibat, maksudnya adalah masalah pemberdayaan wajib memberi dampak yang bagus atau menguntungkan, sebab pandangan gembira atau sedih akan memberi pengaruh pada semangatnya agar menjalankan proses menuntut ilmu atau pemberdayaan dimasa depan.
- c) Asosiasi, maksudnya masalah pemberdayaan wajib bertautan pada aktivitas yang lain karena aktivitas masyarakat mengarah pada menautkan aktivitasnya bersama aktivitas yang lain.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2015: 111) melingkupi beraneka ragam usaha perbaikan, dibawah ini:

1. Perbaikan pendidikan (*Better Education*) maksudnya adalah pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk

pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu akan tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan aksesibilitas (*Better Accessibility*) adalah bertambah dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan serta Lembaga pemasaran.
3. Perbaikan Tindakan (*Better Action*) adalah persiapan peninjauan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*) diinginkan agar diperbaikinya sistem sosial, termasuk pengembangan tingkat kemitraan-bisnis.
5. Perbaikan usaha (*Better Business*) mampu diperbaikinya usaha yang dilaksanakan agar didapatkannya laba.
6. Perbaikan pendapatan (*Better Income*) melalui terlaksananya peningkatan usaha yang dilaksanakan, diinginkan agar

meningkatkan pemasukan yang dihasilkan, tergolong pemasukan famili maupun penduduk.

7. Perbaikan lingkungan (*Better environment*) peningkatan pemasukan diinginkan agar meningkatkan lingkungan (fisik dan sosial) sebab kerusakan lingkungan selalu dikarenakan oleh kekurangan ekonomi atau pemasukan yang rendah.

8. Perbaikan kehidupan (*Better Living*) tujuan ini akan berjalan ketika tujuan perbaikan pendapatan juga berjalan, karena seseorang yang mempunyai pendapatan yang cukup maka mereka dapat hidup dengan baik.

9. Perbaikan masyarakat (*Better community*) situasi aktivitas yang membaik juga dibantu oleh lingkungan, karena itu diinginkan dapat terealisasikan pada aktivitas penduduk yang membaik juga.

6. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Dalam Keputusan Presiden tersebut Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah golongan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PKSKAT) bertujuan untuk memberdayakan KAT dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pelaksanaan dilakukan dengan

memperhatikan adat istiadat setempat. Dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial KAT, Departemen Sosial RI, melakukan:

- 1) Identifikasi dan pemetaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 2) Penyusunan dan penetapan rencana dan program pelaksanaan kesejahteraan sosial KAT yang dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait.

Perwujudan kebijakan yang mana ditunjukkan diatas yang akan disusun selanjutnya pada Menteri Sosial. Perwujudan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PKSKAT) dilaksanakan pada bagian perumahan, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan. Perwujudan pembinaan yang mana dijelaskan diatas dilaksanakan melalui aktivitas pelatihan, arahan, layanan dan pertolongan. Agar perwujudan pembinaan sepadan dengan langkah-langkah dan prosedur PKSKAT yang ditentukan, Menteri Sosial melaksanakan pengamatan, pengelolaan umum, penilaian dan koordinasi bersama pemerintah daerah sekitar dan instansi yang berkaitan (Departemen Sosial RI, 2003:3).

a. Konsep Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Berdasarkan Chamber (1996: 27), Komunitas Adat Terpencil (KAT) berarti perbaikan terhadap perkara kekruangan ekonomi adalah golongan dari usaha pengembangan kemanusiaan kerabat kurang mampu untuk menciptakan mutu kesejahteraan sosialnya.

Komunitas adat adalah kelompok-kelompok yang tetap mengaplikasikan acuan kehidupan khusus yang ditemukan oleh nenek moyang kepada anak cucunya dan leluhurnya. Komunitas adat yang merupakan peninggalan para leluhur itu mendiami sebuah Kawasan terpilih dan sudah terciptanya jauh sebelumnya dari penerus ke penerus bahkan didalamnya terdapat sistem kepemimpinan atau pimpinan tradisional.

Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan golongan sosial budaya yang memiliki sifat kedaerahan dan tersebar juga minim berpartisipasi pada aktivitas baik sosial, ekonomi maupun politik. Pada Komunitas Adat Terpencil ini terdapat membangkitkan & memajukan penduduk. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ialah metode pembelajaran sosial dengan menghormati ide-ide dan keterampilan Komunitas Adat Terpencil pada keperluan & perkara yang ditemukan hingga penduduk dengan mandiri dapat mencukupi keperluan pokok dan dapat mencari jalan keluar dari permasalahannya (Departemen Sosial RI, 2004: 7).

b. Kriteria Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Adapula poin-poin atau standar Komunitas Adat Terpencil yang ditetapkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia (2006: 7) dibawah ini:

1. Berbentuk kelompok yang biasanya kecil, tertutup dan homogen.

Komunitas Adat Terpencil biasanya hidup pada anggota kecil dengan kualitas komunikasi yang rendah terhadap pihak luar. Kelompok KAT biasanya hidup pada kelompok yang sama dan memiliki sifat tidak terbuka..

2. Tindakan sosial berpijak pada relasi kekeluargaan (bersifat tidak resmi dan erat dengan norma adat).

Tindakan sosial yang ada dan meningkat pada KAT biasanya berpijak pada relasi kekeluargaan yaitu masyarakat setiap hari masih berdasarkan relasi kekeluargaan dan pernikahan.

3. Pada dasarnya terpencil secara letak suatu daerah dan sering dikatakan sulit ditemukan.

Secara letak suatu daerah KAT biasanya terletak di kawasan pedesaan, hutan, pegunungan, perbukitan, laut, rawa, daerah pantai yang sukar ditemukan. masalah ini didorong oleh kurangnya perlengkapn fasilitas.

4. Pada dasarnya masih hidup dengan sistem ekonomi tersendiri.

Kegiatan ekonomi masyarakat KAT kesehariannya sekedar melengkapi keperluan hidupnya sendiri (keperluan pokok).

5. Perlengkapan dan teknologi yang biasa saja.

Untuk melengkapi keperluan pokok pada aktivitas bertani, berburu ataupun aktivitas yang lain, KAT tetap memakai perlengkapan seadanya yang diturunkan dari nenek moyang ke anak cucunya.

6. Keterikatan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat sering dikatakan tinggi.

Kehidupan KAT terlalu terikat dengan kesehariannya baik fisik, mental dan kepercayaan pada lingkungan alam atau dekat dengan kondisi alam.

7. Terbatasnya jalur pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Jalur yang susah untuk menemukan KAT baik dalam layanan sosial, ekonomi maupun politik, hal ini dikarenakan oleh letak suatu daerah.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pijakan hukum dilakukannya suatu rencana pemberdayaan KAT pada petunjuk umum pemberdayaan komunitas adat terpencil (2006: 4) yaitu :

- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- b) Peraturan Pemerintah. Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- c) Permensos No.09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

d. Kategori KAT

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pengelompokan KAT dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kelompok I yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan masyarakat KAT yang biasanya bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu dari bermacam-macam potensi sumber daya alam sekitar, bertahap tetap pada yang seadanya, berpisah-pisah dan mengungsi pada kuantitas tertentu, teknologi sering dikatakan masih seadanya, memakai alat kerja yang terbatas, percakapan dengan dunia luar dikatakan sangat terbatas.
2. Kelompok II yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan masyarakat KAT yang biasanya hidup dengan cara bercocok tanam, nomaden yang menjadi wilayah orbitasinya dalam bertahan hidup, teknologi yang dipakai dapat dikatakan lebih bermacam-macam jenisnya, dan juga bisa berkomunikasi dengan dunia luar.
3. Kelompok III yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan masyarakat KAT yang biasanya hidup dengan cara bertani, berkebun atau nelayan yang mendiami daerah tertentu, dan sudah dapat berkomunikasi dengan dunia luar.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Relatif Sama

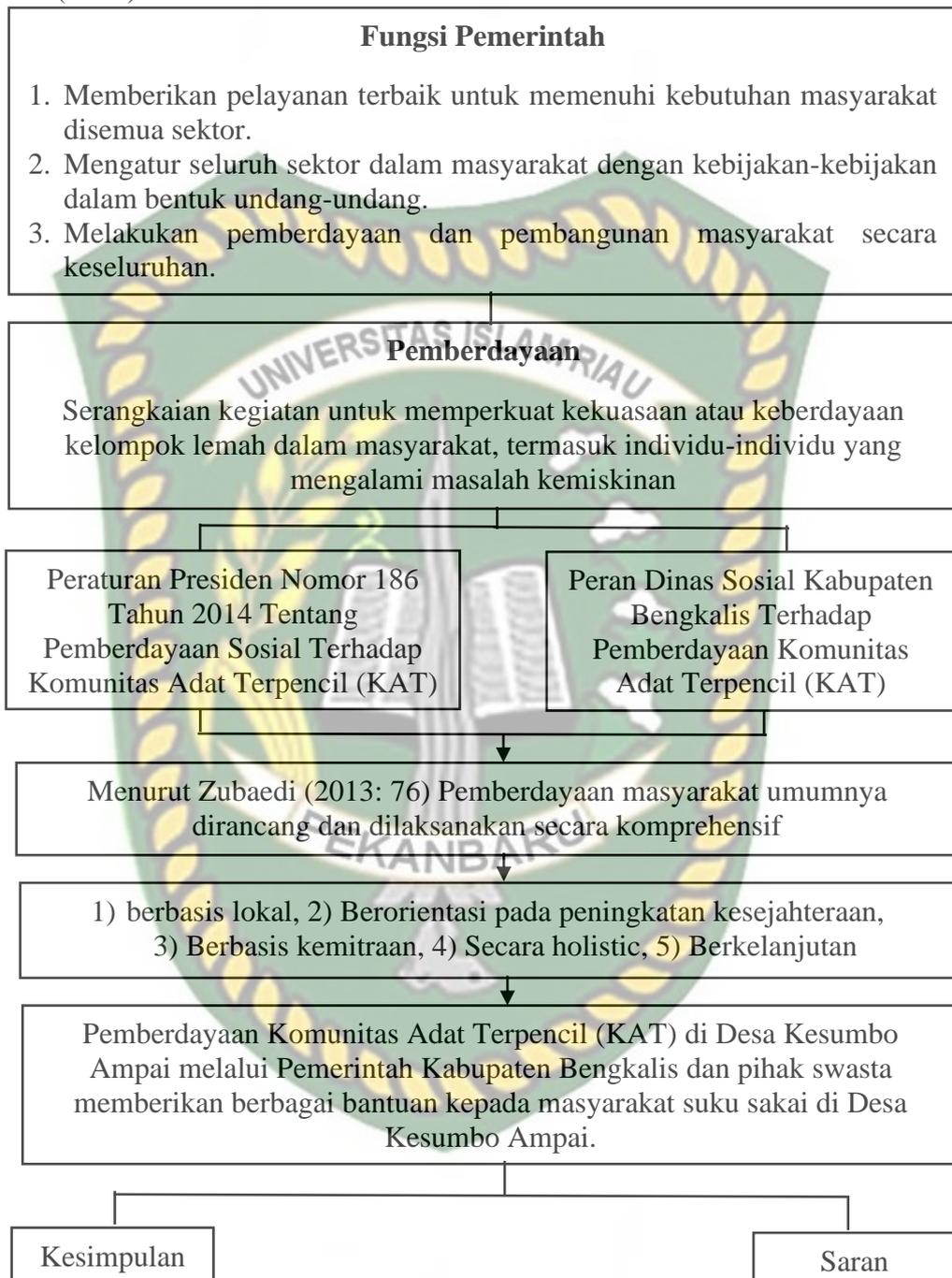
No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Totok Isdarwanto dan Zulva (2010)	Suka Sakai dalam 3 kuasaan di Riau	Orang Sakai adalah orang Veddoid yang bercampur dengan orang Minangkabau yang datang berimigrasi pada sekitar abad ke-14 ke daerah Riau yaitu ke Gasip, di tepi sungai Gasip di hulu sungai rokan. Moszkowski (1908) dan kemudian dikutip oleh Loeb (1935)	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif.
2.	Abu Bakar dan Abd Ghofur (2017)	Problematika Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	Pengamatan Pendahuluan (preliminary research) bahwa telah terdapat program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap Suku Sakai di Duri Kabupaten Bengkalis dan kelembagaan lain.	Sama-sama membahas Pemberdayaan, sedangkan penulis lebih fokus ke program Pemberdayaan Suku Sakai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

3.	Febi Rizka Eliza, M Ridwan, dan Dwi Noerjoedianto (2018)	Peran Pemerintah terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Jambi Provinsi Jambi	Menunjukkan Bahwa Peran Serta Kebijakan Pemerintah dalam Pemerdayaan KAT SAD di bidang kesehatan dapat dilihat dengan diterapkannya pelayanan kesehatan langsung yang diterima KAT SAD seperti Puskesmas keliling, pengobatan gratis dan akses layanan kesehatan ke RSUD Raden Mattaher.	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif
----	--	---	--	--

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial.



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan membantu dibidang sosial seperti pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
3. Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi atau sosial budaya, terpencil atau rentan sosial ekonomi.
4. Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Berbasis lokal
Program pemberdayaan masyarakat yang berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar menjadi penonton dan pemerhati di luar sistem, tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri.
 - b. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
Dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

c. Berbasis kemitraan

Kemitraan akan membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

d. Secara holistik

Bersifat holistik berarti mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Hal ini untuk menghindari masyarakat dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu.

e. Berkelanjutan

Program dirancang dan dilaksanakan dengan memerhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah.



E. Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Operasional Variabel Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala
1	2	3	4	5
Menurut Ali & Andi (2016: 7) kebijakan diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan demi mencapai tujuan yang dikehendaki. Kewenangan dalam arti hak untuk ditaati (Syafiie, 2007: 35)	Peran Dinas Sosial Terhadap Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal	a. Menggerakkan masyarakat b. Kesiediaan untuk Kerjasama	Nominal
		Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan	a. Pemanfaatan waktu b. Mengikutsertakan masyarakat	Nominal
		Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan	a. Ketersediaan b. Membangun kemampuan	Nominal
		Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik	a. Mengajak masyarakat b. Mempengaruhi masyarakat	Nominal
		Pemberdayaan masyarakat berjalan secara berkelanjutan	Pemantauan	Nominal

Sumber: Olahan Peneliti 2021

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Kualitatif Deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2011:166).

Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk diterapkan bila penelitian itu bertujuan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan bila penelitian ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan (Suyanto dan Sutinah, 2011:174).

Menurut Anggito dan Johan (2018: 20) pada penelitian kualitatif arah dan fokus suatu penelitian antara lain: membangun teori dari data atau fakta, mengembangkan sintesa interaksi dan teori-teori yang dibangun dari fakta-fakta mendasar (*grounded*), mengembangkan pengertian, dan sebagainya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243 dalam T. Heru Nurgiansah, 2018: 63).

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau. Peneliti memilih lokasi ini karena masih terdapat berbagai permasalahan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan juga berkaitan dengan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang belum sesuai dengan apa Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam bidang Pemberdayaan Sosial terdapat pada Pasal 17 Ayat (1).

C. Informan Penelitian

a. Key Informan

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Bagong, 2006:172) sedangkan menurut Gora (2019: 279) Key informan dapat diartikan sebagai sumber utama yang layak disebut sebagai sumber berkompeten dalam suatu hal atau suatu bidang tertentu secara lebih dibandingkan dengan yang lain. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai yaitu Bapak Muhammad Nasir.

b. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi walau tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti (Bagong, 2006:172) sedangkan menurut Bado (2022: 351) informan adalah

seseorang yang memiliki sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nama – Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Indra Musahir	Sekretaris Desa Kseumbo Ampai
2	Asmadi	Humas PT. Murini
3	Budianto	Manager PT. ISA
4	Aulia Army Effendi	Camat Bathin Solapan
5	Abdullah Rasyid	Masyarakat
6	Ahmad Suroso	Masyarakat
7	Rozita	Masyarakat
8	Hermansyah	Masyarakat
9	Imam Abdul Khodlid	Masyarakat

Sumber: Olahan Peneliti 2021

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dalam hal ini adalah tanggapan langsung dari wawancara terhadap informan penelitian. Menurut Kusumastuti dan Ahmad (2019: 34) data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.

b. Data Sekunder

Menurut Khusumastuti dan Ahmad (2019: 34) data sekunder adalah data yang berupa data-data yang telah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan.

Data sekunder yaitu data dari pihak kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Seberapa jauh perkembangan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Apa saja program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
3. Data-data yang lain menurut Penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Satori dan Aan (2011: 103) teknik pengumpulan data kualitatif adalah cara dengan menelusuri dokumen yang ada serta berkaitan dengan focus saat melakukan sebuah penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, Menurut Bungin (2013:142) observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebafai alat banti utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada di lapangan.

- b. Wawancara merupakan pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015: 72). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara (Afrizal, 2016:21).
- c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa bahan tertulis seperti seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan (Afrizal, 2016:21). Sedangkan menurut Arikunto (2006: 158) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam Sugiyono (2018: 334) menurut Bogdan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai

Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten

Bengkalis.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2022																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	x	x	x	x	x	x	x																					
2	Seminar UP								x	x																			
3	Revisi UP											x	x																
4	Riset												x	x															
5	Penelitian Lapangan															x	x												
6	Pengolahan Dan Analisis Data																			x	x	x							
7	Bimbingan Skripsi																				x	x	x						
8	Ujian Skripsi																										x		
9	Revisi Skripsi																											x	x
10	Pengadaan Skripsi																												x

Sumber: Olahan Peneliti 2022

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, konsep operasional, operasional variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan sejarah ringkas tempat penelitian, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi, sumber daya organisasi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas tentang identitas responden, deskripsi data dan analisis data, serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan dari hasil penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Bengkalis ketika itu belum bernama Bengkalis, seperti halnya kejadian sebuah Negeri Melayu dalam tradisi Melayu. Disebut orang Kuala Batanghari namanya. Di hulu Kuala Batanghari ini terdapat tanah busut disebuah tasik kecil. Karena itu pulau tersebut di daerah ini dikenal tanah tumpukan dengan sebutan “Pulau Sembilan”. Menurut Jasman K (tt) seorang guru SR dan dituliskan pada 27 September 1980 lagi -tanpa menyebutkan sumber- nama Kuala Batanghari dan Pulau Sembilan kemudian kelak berganti nama menjadi Bengkalis. Peristiwa pergantian nama ini bermula setelah menghilirnya Perangkat Raja Kecil yang diiringi dengan 40 orang awak Lancang dan 40 orang Kepala Suku, yaitu Suku Lima Puluh, Suku Tanah Datar, Suku Pesisir dan satu suku lagi dari Suku Lima Puluh juga. Konon dalam sejarah Melayu Raja Kecil memang dibesarkan di Ranah Minang.

Dahulu kala Bengkalis memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, berawal pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan desa nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678, kawasan ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama para pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang

Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat. Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejahleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

a. Visi Kabupaten Bengkalis

Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera.

b. Misi Kabupaten Bengkalis

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

3. Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara $2^{\circ}30'$ Lintang Utara (LU), $-0^{\circ}17'$ Lintang Utara atau $100^{\circ}52'$ Bujur Timur (BT), $-102^{\circ}52'$ Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Riau.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatera dan wilayah Kepulauan, dengan luas adalah $6.973,00 \text{ km}^2$. Jumlah penduduk Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 593.397 jiwa, dan ibu kota Kabupaten berada di Kecamatan Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di Muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah Delta Sungai Siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah kota Duri yang berada di Kecamatan Mandau.

4. Luas dan Wilayah Kabupaten Bengkalis

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah $30.646.83 \text{ km}^2$, meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibu kotanya adalah Kota Bengkalis dan

terletak di pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya Sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri-Bengkalis 106 km, Dumai-Bengkalis 78 km, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 pulau besar dan kecil. Beberapa diantara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan pulau Bengkalis (938,40 km²).

B. Gambaran Umum Desa Kesumbo Ampai

1. Sejarah Singkat Desa Kesumbo Ampai

Perjalan munculnya Desa Kesumbo Ampai dipengaruhi oleh berbagai zaman dan pradaban. Banyak pendapat mengatakan tentang asal-usul Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai. Salah satu pendapat mengatakan berasal dari Suku Melayu Tertua dan penjajah yang bersamaan dengan datangnya bangsa-bangsa yang menyebar ke seluruh plosok nusantara.

Datang nya bangsa-bangsa tersebut sangat berpengaruh kepada masyarakat sakai yang menetap di Desa Kesumbo Ampai. Pengaruh tersebut dapat dilihat baik dari sisi kehidupan masyarakat, kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat nya. Salah satu peninggalan yang masih melekat adalah rumah adat bonai yang memiliki sejarah panjang. Menurut sejarah daerah Desa Kesumbo Ampai pada masa dahulu system pemerintahan

berada dibawah pemerintahan raja. Segala sesuatu urusan daerah Desa Kesumbo Ampai yang memerintah adalah raja.

Seiring perkembangan zaman raja yang memerintah daerah Desa Kesumbo Ampai saat ini tidak ada lagi, akibatnya terjadinya perkembangan dan pertumbuhan sosial politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Kesumbo Ampai. Saat ini masyarakat Desa Kesumbo Ampai menggunakan sistem kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa Kesumbo Ampai.

2. Visi dan Misi Desa Kesumbo Ampai

a. Visi

Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang professional serta berdayaguna dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada segala aspek pembangunan menuju Desa yang mandiri dan madani.

b. Misi

Meningkatkan mutu pelayanan serta keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Desa secara merata dan bertanggung jawab.

3. Kondisi Geografis Desa Kesumbo Ampai

Desa Kesumbo Ampai dibentuk pada tahun 2004 dengan luas wilayah 10.000 ha. Penduduk nya sekitar 8741 jiwa, dan mata pencarian masyarakat kebanyakan Bertani dan nelayan. Secara Geografis Desa Kesumbo Ampai ini berbatas dengan, sebelah utara Desa Kepenghuluan Mumugo, Sebelah Selatan Desa Bumbang, Sebelah Barat Desa Boncah Mahang dan Sebelah Timur Desa Bathin Sobanga. Disamping itu mempunyai luas hutan milik

rakyat seluas 1.165 ha dan hutan milik pemerintah 1.318 ha. Masyarakat Desa Kesumbo Ampai umumnya bersuku Sakai. Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai dikelilingi oleh hutan dan Sebagian dari masyarakat Sakai masih bertempat tinggal didaerah darat dan sungai, mereka membuat pemukiman dengan berjalan kaki untuk merambah hutan yang dijadikan tempat tinggal.



Gambar 4.1 Peta Desa Kesumbo Ampai

Sumber : Kantor Desa Kesumbo Ampai

Desa Kesumbo Ampai merupakan wilayah administrative Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Memiliki batas-batas wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Mandau, Sebelah Barat berbatasan Dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

4. Keadaan Penduduk Di Desa Kesumbo Ampai

Desa Kesumbo Ampai merupakan desa yang telah dimekarkan sejak tahun 2006 yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Total luas wilayah Desa Kesumbo Ampai adalah 10.000.000 km³ (1 km³ = 100

hektar) dan luas hutan yang ada di Desa ada 11 km³ (1 km³ = 100 hektar). Jumlah total penduduk sebanyak 5.208 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Penduduk
< 1 tahun	162 jiwa
1 – 4 tahun	105 jiwa
5 – 14 tahun	756 jiwa
15 – 39 tahun	2.012 jiwa
40 – 64 tahun	1.105 jiwa
65 tahun ke atas	112 jiwa

Sumber : Kantor Desa Kesumbo Ampai tahun 2022

Di Desa ini tak hanya suku sakai atau melayu tetapi ada beberapa suku juga tinggal di Desa ini sejak lama. Walaupun berbeda-beda suku masyarakat di Desa Kesumbo Ampai dapat hidup dengan tentram dan sejahtera.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Suku.

Suku	Jumlah Penduduk
Batak	1.416 jiwa
Melayu	352 jiwa
Minang	242 jiwa
Jawa	1.866 jiwa
Sakai	710 jiwa

Sumber : Kantor Desa Kesumbo Ampai tahun 2022

5. Sosial Budaya Masyarakat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai

1. Adat Istiadat

Adat Istiadat mempunyai aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia. Kebiasaan diartikan dengan pengertian adat yang digunakan oleh sekelompok orang.

Adat istiadat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Karena adat istiadat merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai. Setiap kegiatan adat istiadat yang dilakukan masyarakat Suku Sakai dipimpin oleh Kepala Suku, Kepala Desa dan Minik Mamak dalam sistem kepemimpinannya.

Masyarakat Suku Sakai memiliki adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun dari dahulu sampai sekarang, baik secara individu, berkelompok, resmi maupun tidak resmi. Kegiatan adat istiadat di Desa Kesumbo Ampai seperti pemilihan Kepala Suku dan acara perkawinan selalu ditampilkan Tari Poang sebagai pembukaan pada acara yang dilaksanakan, hal ini merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Suku Sakai di Desa kesumbo Ampai.

2. Mata pencarian

Mata pencarian masyarakat Sakai di Desa Kesumbo Anpai pada umumnya sebagai petani, nelayan, dan berburu binatang. Selain itu, mereka juga mendapatkan uang tambahan dari bekerja sebagai buruh.

3. Agama dan kepercayaan

Masyarakat Sakai di Desa Kesumbo Ampai sama seperti masyarakat lainnya mempunyai agama dan kepercayaan yang berperan penting dalam kehidupan individu maupun berkeluarga. Masyarakat Suku Sakai mayoritas beragama Islam yang sudah diwariskan turun-temurun dengan bercorak Islam melayu. Walaupun mayoritas masyarakat beragama Islam, namun kepercayaan dari nenek moyang mereka dipadukan dengan ajaran agama Islam yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Kesumbo Ampai. Hal ini dibuktikan dengan adanya perilaku masyarakat Sakai yang masih percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib yang bersifat animisme.

4. Kesenian

Seni tumbuh dan berkembang merupakan hasil ekspresi dan kreativitas masyarakat pemiliknya. Masyarakat dan seni merupakan kesatuan yang saling terikat dan berkaitan, karna itu maka terbentuklah sebuah kelas atau golongan tertentu yang menghadirkan gaya seni yang berbeda sesuai dengan bentuk masyarakat yang ada disekitar tempat tinggalnya, selain itu tumbuh dan berkembangnya kesenian disuatu daerah sangat ditentukan oleh perhatian masyarakat terhadap kesenian tersebut.

Kabupaten bengkalis memiliki banyak kesenian diantaranya yang terdapat di Desa Kesumbo Ampai. Desa ini hanya memiliki satu kesenian yaitu Tari Poang.

6. Sarana Dan Prasarana Di Desa Kesumbo Ampai

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang dalam menjalankan berbagai aktivitas. Sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak dan digunakan untuk meraih tujuan bersama.

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Desa Kesumbo Ampai

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Gedung	6 unit
Komputer	3 unit
Laptop	4 unit
Meja	12 unit
Kursi	10 unit
Sofa tamu	2 unit
Kursi tunggu	2 unit
Printer	3 unit
Kipas Angin	7 unit
Ac	2 unit
Lemari arsip	14 unit
Ambulance	1 unit
Kereta Dinas	5 unit
Tong Sampah	5 unit
Musholla	1 unit
CCTV	5 unit
Tv	1 unit

Sumber : Kantor Desa Kesumbo Ampai tahun 2022

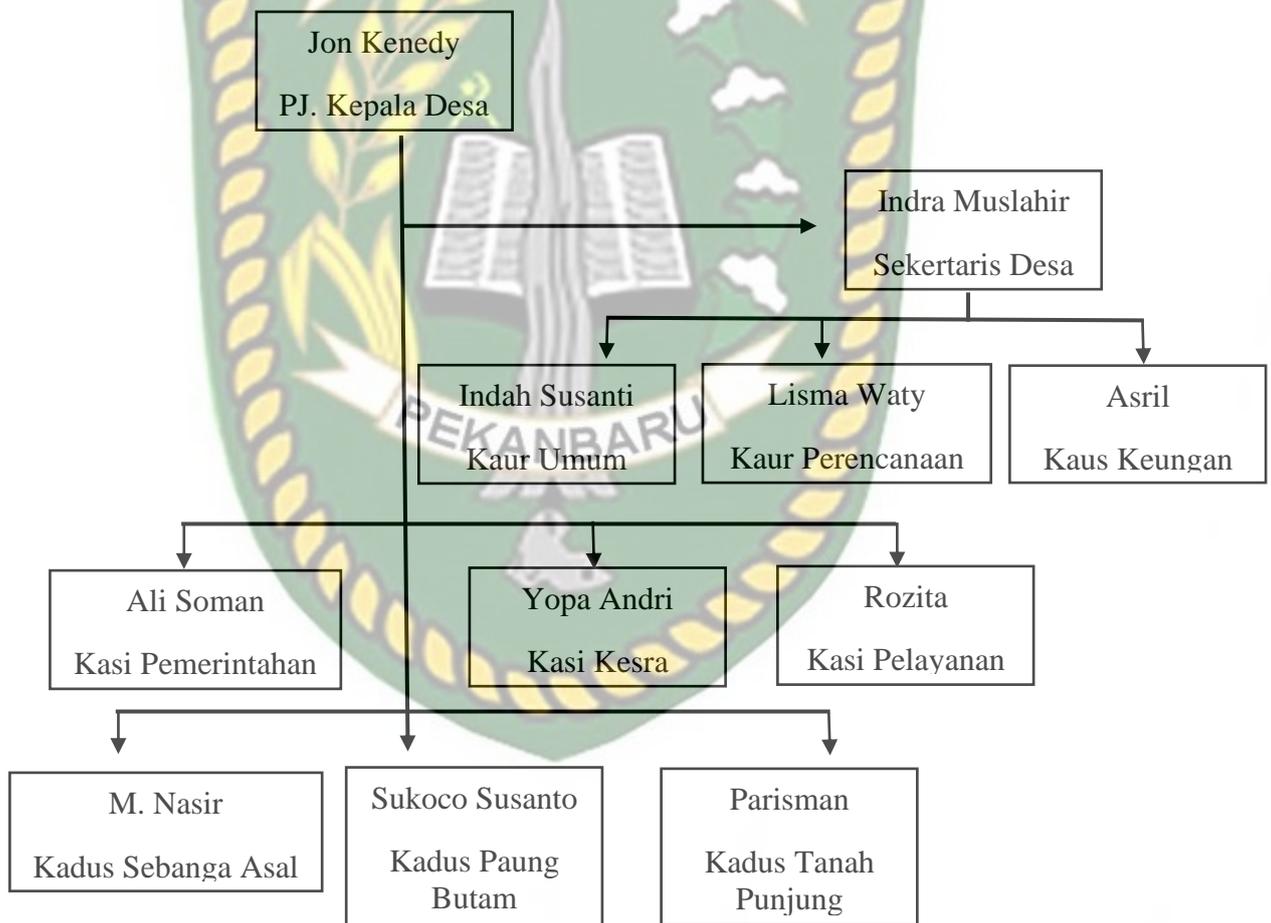
Di kantor Desa Kesumbo ampai terdapat 7 ruangan yaitu Ruangan Sekdes, Ruangan Pembangunan Atau Perencanaan, Ruangan Kesra, Ruangan Pelayanan, Ruangan Keuangan, Ruangan PJ atau Kades dan Ruangan

Pemerintah. Di Desa Keumbo Ampai terdapat 6 gedung yaitu Gedung Kantor Desa, Gedung PKK, Gedung Aula, Gedung BPD, Gedung Bumdes dan Gedung perpustakaan.

7. Struktur Organisasi Kantor Desa Kesumbo Ampai

Secara terperinci Struktur Organisasi Kantor Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Kesumbo Ampai



Sumber : Kantor Desa Kesumbo Ampai tahun 2022.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Informasi Penelitian

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai yang berjumlah 1 (satu) orang, sedangkan informan lainnya adalah mereka yang terlibat langsung dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai yang berjumlah 9 (sembilan) orang, sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang. Adapun karakteristik dari informan diidentifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat Pendidikan.

a. Umur Informan

Dalam sebuah penelitian tentunya pemberian informasi tidak perlu memiliki batasan umur, tetapi semakin tinggi tingkat umur maka jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang. Tingkat umur informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam table dibawah ini:

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

NO	Umur	Jumlah
1	Umur 62 tahun	1
2	Umur 40 – 61 tahun	5
3	Umur 20 – 39 tahun	4
Jumlah		10

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Dengan melihat table diatas maka diketahui bahwa informan yang berumur 62 tahun berjumlah 1 (satu) orang. Kemudian, informan yang memiliki rentang umur 40 – 61 tahun berjumlah 4 (empat) orang dan

informan yang memiliki rentang umur 20 – 39 tahun berjumlah 5 (lima) orang. Jadi, berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini sudah relatif dewasa untuk memberikan informasi yang valid kepada peneliti.

b. Jenis Kelamin

Pada penelitian, tentunya jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia memberikan jawaban yang valid. Jenis kelamin informan tidak bisa menentukan pola pikir ataupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penilitan, maka dari itu jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	1
Jumlah		10

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa informan menurut jenis kelamin laki-laki ada 10 orang dan dapat disimpulkan bahwa semua informan adalah laki-laki. Sehingga jika melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini.

c. Tingkat Pendidikan

Secara teoritis, Pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman pada saat dilakukan penelitian. Dengan adanya tingkat Pendidikan ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Dalam penelitian ini, tingkat Pendidikan informan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Identitas Informasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S1	3
2	SMA	6
3	Tidak Ada	1
Jumlah		10

Sumber: Olahan Peneliti, 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas tingkat Pendidikan terakhir informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu S1 berjumlah 3 (tiga) orang, SMA berjumlah 6 (enam) orang dan yang Tidak Lulus SD berjumlah 1 (satu) orang. Maka dari tabel diatas informan paling banyak adalah dari tingkat Pendidikan terakhir SMA yaitu berjumlah 6 orang.

B. Hasil Penelitian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana jawaban informan terhadap penelitian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Zubaedi (2013: 76) yaitu, pemberdayaan masyarakat pada umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif berdasarkan:

1. Berbasis lokal
2. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
3. Berbasis kemitraan
4. Secara holistik
5. Berkelanjutan

Berikut ini akan dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada 10 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan sudah sesuai dengan indikator penelitian.

a. Berbasis Lokal

Menurut Zubaedi (2013: 76) Program pemberdayaan masyarakat yang berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar menjadi penonton dan pemerhati di luar sistem, tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri.

Berbasis lokal maksudnya adalah mengikutseratakan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Hal ini berkaitan dengan peran masyarakat dalam keikutsertaan Pemberdayaan Masyarakat. Pada indikator ini masyarakat menilai bahwa Pemerintahan Kabupaten Bengkalis meperhatikan dan mengikutsertakan masyarakat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai yang ada di Desa Kesumbo Ampai.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Nasir (Bathin) selaku Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai saat ditemui di Rumah Adat Suku Sakai Bathin Solapan mengatakan bahwa:

“Ada, masyarakat diikut sertakan dalam program pemberdayaan Suku Sakai oleh Kabupaten Bengkalis. Ada beberapa perwakilan yang aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan Adat istiadat Suku Sakai yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bengkalis.” (Wawancara tanggal 19 April 2022, Pukul 17.00 WIB)

Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama serta waktu dan tempat yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Tergantung bantuan juga. Seperti halnya bantuan sembako itu sudah merata baik dari Pemerintahan Bengkalis maupun swasta dan masyarakat juga aktif dalam membantu menyebarkan bantuan ini. Tetapi kalau bantuan seperti perbaikan atau pembangunan masih belum terjadi dengan merata. Kalau bantuan ekonomi, Alhamdulillah Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai tak begitu susah seperti Suku Sakai di tempat lain, boleh dikatakan sudah aman.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 17.00)

Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai sudah melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rasyid selaku masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan saat ditemui di Rumah nya mengatakan bahwa:

”Ya, kalau ada program Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai di Desa ini, beberapa masyarakat memang di ajak dalam pelaksanaan program tersebut ya tetapi perwakilan saja, tidak semua tetapi setidaknya ada yang ikut serta dalam program pemberdayaan tersebut.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 13.00)

Kemudian dilakukan wawancara dengan Bapak Indra selaku Sekdes Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan saat dijumpai di Rumah nya mengatakan bahwa:

“Ya tentu saja masyarakat harus ikut serta dalam program Pemberdayaan Masyarakat itu. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar ikut serta dan beberapa masyarakat juga sangat aktif dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.”
(Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 15.00)

Dari ungkapan diatas menjelaskan bahwa masyarakat juga terlibat dalam program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau pengamat saja dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 5.4 Hasil Observasi Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Berbasis Lokal.

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai
2	Pelaksanaan Kegiatan	Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
3	Waktu Kegiatan	Tidak Terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
5	Peserta yang Terlibat	Kepala Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai, Sekdes Kesumbo Ampai dan Masyarakat.
6	Hasil Observasi	Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Kesumbo Ampai terkait Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) selalu melibatkan masyarakat setempat dalam program pemberdayaan

		walaupun hanya beberapa yang aktif dan menjadi perwakilan dalam keikutsertaan pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai.
--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2022.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, masyarakat Suku Sakai di Desa Keumbo Ampai selalu ikut serta dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai serta beberapa masyarakat aktif dalam pelaksanaan Program walaupun tidak banyak dan hanya beberapa yang menjadi perwakilan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai.

b. Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan

Menurut Zubaedi (2013: 76) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan maksudnya dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan adalah seberapa berpengaruh program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Desa Kesumbo Ampai.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Nasir (Bathin) selaku Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai saat ditemui di Rumah Adat Suku Sakai Bathin Solapan mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah beberapa fasilitas sarana dan prasarana ada disediakan oleh Kabupaten Bengkalis. Sehingga di Desa ini dapat menuju kesejahteraan walaupun perlahan-lahan untuk mencapai sejahtera yang seutuhnya.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 17.00)

Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama serta waktu dan tempat yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Beberapa program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai beberapa sudah diumumkan dan Insya Allah akan dilaksanakan pada tahun ini. Tetapi jika untuk beberapa tahun terakhir dikarenakan Corona pembangunan masih belum ada terjadi dan juga karena lahan Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai ini masih di dalam izin lahan orang. Nah untuk sekarang inilah yang saya urus agar hak izin ini agar dilepaskan agar bantuan pembangunan oleh pihak Kabupaten Bengkalis dapat terlaksana dengan lancar.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, pukul 17.00)

Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan mengungkapkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Bengkalis sudah menyediakan beberapa fasilitas sarana dan prasana di Desa demi mencapai kesejahteraan Desa Kesumbo Ampai. Fasilitas tersebut sangat berguna bagi desa dan tentunya juga bermanfaat bagi masyarakat Suku Sakai sekitarnya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Indra selaku Sekdes Desa Kesumbo ampai Kecamatan Bathin Solapan saat dijumpai di Rumah nya mengatakan bahwa:

“Sejauh ini sedah ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis seperti Posyandu, Pos PAUD yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Alhamdulillah beberapa fasilitas tersebut dapat menunjang kesejahteraan Desa khususnya masyarakat yang berdominan Suku Sakai.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 15.00)

Selanjutnya wawancara dengan Saudara Suroso selaku masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai saat ditemui di Rumahnya mengatakan bahwa:

“Untuk beberapa tahun terakhir belum ada yang saya lihat, dikarenakan untuk pembangunan oleh Kabupaten Bengkalis disini lumayan agak susah. Mungkin ada halangan karena beberapa faktor, tetapi dulu ada bantuan dari Bengkalis dalam pembangunan seperti pos-pos tapi itu sudah sangat lama sekali.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, pukul 16.00)

Dari penjelasan diatas mengungkapkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Bengkalis sudah ada menyediakan beberapa fasilitas umum yang dapat digunakan oleh Masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai dalam menunjang kesejahteraan. Namun, beberapa tahun terakhir karena beberapa faktor belum ada program Pemberdayaan yang berjalan dan menurut info yang didapat kemungkinan program pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan lagi pada tahun ini.

Tabel 5.5 Hasil Observasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan.

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai
2	Pelaksanaan Kegiatan	Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
3	Waktu Kegiatan	Tidak terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
5	Peserta yang terlibat	Kepala Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai, Sekdes Kesumbo Ampai dan Masyarakat.

6	Hasil Observasi	Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Kesumbo Ampai terkait Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah ada menyediakan beberapa Fasilitas kepada masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai, walaupun beberapa tahun terakhir program pemberdayaan sempat tertunda.
---	-----------------	---

Sumber: Olahan peneliti, 2022.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, kesejahteraan di Desa Kesumbo Ampai perlahan-lahan sudah mulai diberi bantuan dari Pihak Pemerintah Kabupaten dan Pihak Swasta. Artinya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup peduli terhadap kesejahteraan Masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai walaupun beberapa tahun terakhir program pemberdayaan sempat tertunda. Masyarakat merasa senang dan puas apabila program Pemberdayaan tersebut akan dilaksanakan Kembali pada tahun ini.

c. Berbasis Kemitraan

Menurut Zubaedi (2013: 76) kemitraan akan membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas. Berbasis kemitraan pada Pemberdayaan Masyarakat adalah seberapa berpengaruh bantuan-bantuan terhadap masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat sehingga berpotensi dalam peningkatan akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen dan lainnya.

Informasi yang diperoleh dari Bapak Nasir (Bathin) selaku Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai saat ditemui di Rumah Adat Suku Sakai Bathin Solapan mengatakan bahwa:

“Ini zaman sudah canggih, sudah ada beberapa web di google yang dapat diketahui masyarakat mengenai program pemberdayaan Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bengkalis.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 17.00).

Kemudian pertanyaan selanjutnya dengan orang yang sama serta waktu dan tempat yang sama beliau mengatakan:

“Jika tentang pembangunan itu tidak terlalu mempengaruhi karena Kabupaten Bengkalis masih sangat sulit melakukan pembangunan yang dikarenakan lahan atas izin lahan orang itu tadi. Tetapi jika tentang bantuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan Alhamdulillah kita sudah merasakan itu dan sangat mempengaruhi kita.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 17.00)

Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai mengungkapkan bahwa untuk program Pemberdayaan masyarakat seperti bantuan ekonomi, pendidikan dan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat itu sudah dirasakan dan sudah berpengaruh kepada kehidupan yang lebih baik. Selain itu, masyarakat juga sudah bisa mengakses beberapa program bantuan melalui google yang telah diberikan dan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini, tampak bahwa masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai telah bisa menggunakan teknologi.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rasyid selaku masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan saat ditemui di Rumah nya mengatakan bahwa:

“Sebenarnya bantuan-bantuan itu hanya sedikit berpengaruh dan tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat. Kenapa saya katakana begitu, karena bantuan yang diberikan itu bisa dikatakan belum merata dan hanya berpengaruh bagi yang menerimanya saja. Bagi yang belum menerima dan membutuhkan itu sama sekali belum berpengaruh, tetapi bagi sebagian orang mungkin sudah berpengaruh pada kehidupannya.”
(Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 13.00)

Dari beberapa ungkapan diatas menjelaskan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat terkhusus Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan masih belum merata dan hanya beberapa masyarakat yang dapat menerima beberapa bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pihak Swasta. Tetapi Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai sudah mulai mengikuti perkembangan zaman dalam menggunakan teknologi dan dapat dikatakan bahwa saat ini Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai telah mengalami kemajuan dan mulai menjadi masyarakat yang modern.

Tabel 5.6 Hasil Observasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Berbasis Kemitraan.

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai
2	Pelaksanaan Kegiatan	Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
3	Waktu Kegiatan	Tidak terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
5	Peserta yang terlibat	Kepala Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai, masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai.

6	Hasil Observasi	Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Kesumbo Ampai terkait Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah ada seperti bantuan ekonomi, pendidikan dan Kesehatan yang lumayan berpengaruh kepada masyarakat. Tetapi, bantuan tersebut masih belum merata.
---	-----------------	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, Pemerintahan Kabupaten Bengkalis sudah menyalurkan beberapa bantuan ekonomi, pendidikan dan Kesehatan kepada masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan tetapi beberapa masyarakat ada yang merasa bahwa bantuan tersebut masih belum merata. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga sudah menyediakan web agar masyarakat dapat mengakses dan melihat bantuan yang diberikan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis.

d. Secara Holistik

Menurut Zubaedi (2013: 76) bersifat holistik berarti mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Hal ini untuk menghindari masyarakat dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Nasir (Bathin) selaku Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai saat ditemui di Rumah Adat Suku Sakai Bathin Solapan mengatakan bahwa:

“Kalau tepat sasaran, Alhamdulillah bantuan itu iya sudah tepat sasaran. Karena jika untuk bantuan budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan baik dari Pemerintahan Bengkalis dan Pihak Swasta itu sudah tepat sasaran. Tetapi selain dari itu seperti pembangunan ya seperti yang saya katakan tadi masih belum bisa karena sulitnya izin lahan. Terlepas dari bantuan itu semua, walaupun tidak ada bantuan masalah pencaharian di Desa ini kami masih bisa berkebun dan juga bertani.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 17.00)

Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai menyampaikan bahwa saat ini Masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai sudah mandiri dan tidak terlalu ketergantungan kepada bantuan. Tetapi, jika bantuan itu ada mereka juga ingin merasakan program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka kepedulian Pemerintah kepada mereka.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Indra selaku Sekdes Desa Kesumbo ampai Kecamatan Bathin Solapan saat dijumpai di Rumah nya mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah kalau upaya peningkatan dalam Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai itu sudah ada, tetapi ya namanya juga masih upaya berarti masih dalam tahap proses. Bantuan-bantuan Alhamdulillah sudah disalurkan kepada masyarakat. Terlepas dari itu semua alhamdulillah masyarakat di Desa kami pandai berkebun dan bertani sehingga untuk perekonomian sudah mulai membaik.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 15.00)

Selanjutnya wawancara dengan Saudara Suroso selaku masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai saat ditemui di Rumahnya mengatakan bahwa:

“Kalau kami insya Allah terkait ekonomi alhamdulillah masih bisa dibilang aman ya. Kami masih bisa berkebun, bertani atau berternak. Kalau ada bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk Masyarakat Suku Sakai itu ya Alhamdulillah tetapi walaupun tidak ada ya tidak apa-apa. Kami himbau kalau bisa ya tiap tahun nya di

adakanlah bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat itu.”
(Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 16.00)

Dari ungkapan diatas menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Kesumbo Ampai tidak terlalu bergantung kepada program pemberdayaan itu, tetapi jikalau ada masyarakat juga sangat gembira dan menyimpulkan bahwa pemerintah masih peduli terhadap Komunitas Adat Terpencil khususnya Suku Sakai yang ada di Desa Kesumbo Ampai.

Tabel 5.7 Hasil Observasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Secara Holistik.

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai
2	Pelaksanaan Kegiatan	Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
3	Waktu Kegiatan	Tidak terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
5	Peserta yang terlibat	Kepala Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai, Sekdes Kesumbo Ampai dan masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai.
6	Hasil Observasi	Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Kesumbo Ampai terkait Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) bahwa masyarakat sudah mulai mandiri dengan cara berkebun, bertani dan berternak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat juga tidak terlalu ketergantungan pada bantuan-bantuan program pemberdayaan

		KAT tetapi masyarakat juga berharap program itu tidak dihilangkan atau lebih diperhatikan lagi.
--	--	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai sudah mulai mendekati kehidupan yang modern. Mereka sudah mulai bertani, berkebun dan berternak maka dari itu masyarakat tidak terlalu bergantung pada bantuan-bantuan yang diadakan program pemberdayaan masyarakat KAT. Tetapi, meskipun begitu masyarakat juga tidak memungkiri bahwa mereka juga membutuhkan beberapa bantuan program itu.

e. Berkelanjutan

Menurut Zubaedi (2013: 76) berkelanjutan maksudnya program dirancang dan dilaksanakan dengan memerhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Nasir (Bathin) selaku Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai saat ditemui di Rumah Adat Suku Sakai Bathin Solapan mengatakan bahwa:

“Peningkatan dari tahun ke tahun itu ada tetapi berangsur-angsur. Peningkatan sedikit demi sedikit ada tetapi lumayan lamban dikarenakan beberapa faktor tadi.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 17.00)

Kemudian pertanyaan selanjutnya dengan orang yang sama serta waktu dan tempat yang sama beliau mengatakan:

“Berkelanjutan itu ada, karena beberapa bantuan dari pihak Kabupaten Bengkalis dan Pihak Swasta setiap tahun nya masih ada. Tidak hanya

bantuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan bahkan bantuan budaya juga sudah diberikan ya seperti Rumah adat yang dibangun oleh PT Sinarmas ini.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 17.00)

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Nasir (Bathin) selaku Kepala Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan mengungkapkan bahwa program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Desa Kesumbo Ampai memenuhi indikator berkelanjutan karena tiap tahun selalu ada program pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun pihak Swasta lainnya.

Selanjutnya wawancara dengan Saudara Suroso selaku masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai saat ditemui di Rumahnya mengatakan bahwa:

“Untuk program pemberdayaan KAT di Desa ini tiap tahunnya itu ada, tetapi semenjak Covid-19 ada beberapa program yang sepertinya terhenti dan ada juga yang berlanjut setiap tahunnya.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 16.00)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rasyid selaku masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan saat ditemui di Rumah nya mengatakan bahwa:

“Dari tahun ke tahun itu setau saya ada programnya, mungkin juga peningkatan ada dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tetapi ada juga program yang sempat terhenti dan kabarnya di akhir tahun ini akan dilanjutkan kembali. Ya saya harap itu terealisasikan.” (Wawancara tanggal 16 April 2022, Pukul 13.00)

Dari ungkapan wawancara diatas mengungkapkan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada

di Desa Kesumbo Ampai setiap tahunnya berjalan secara berkelanjutan walaupun ada beberapa program yang sempat terhenti.

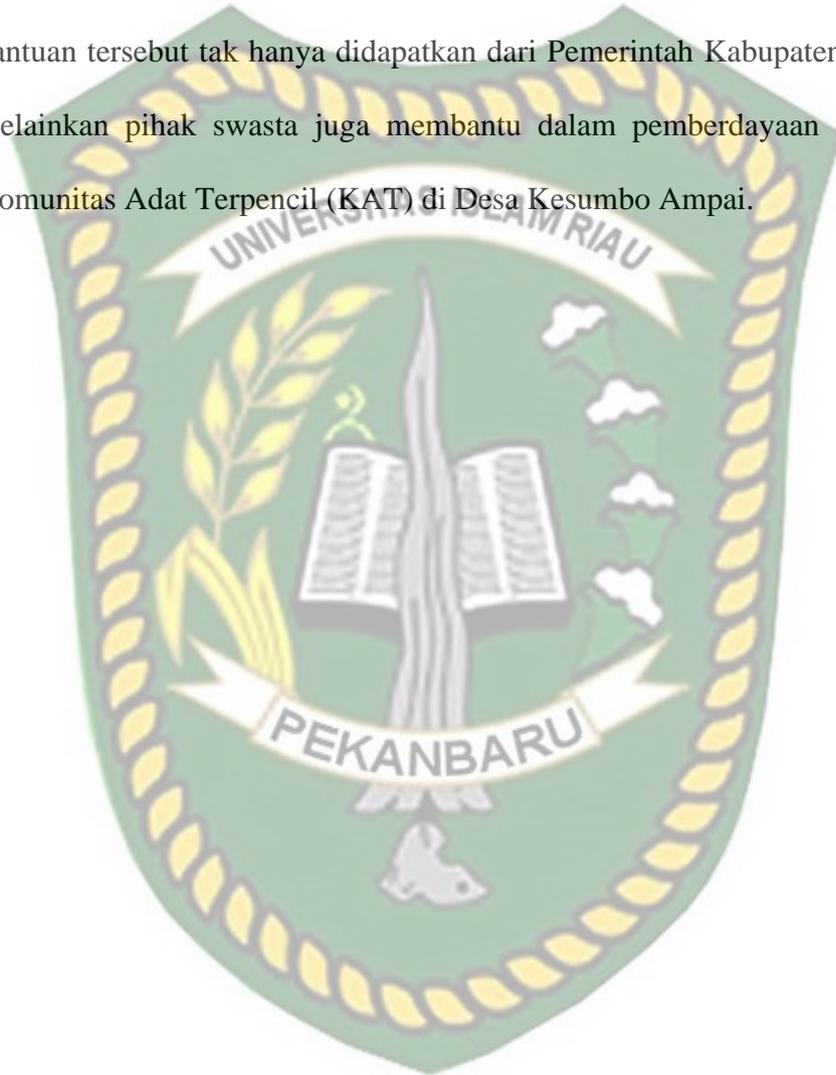
Tabel 5.8 Hasil Observasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Berdasarkan Berkelanjutan.

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai
2	Pelaksanaan Kegiatan	Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
3	Waktu Kegiatan	Tidak terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
5	Peserta yang terlibat	Kepala Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai dan masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai.
6	Hasil Observasi	Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Kesumbo Ampai terkait Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) bahwa program pemberdayaan masyarakat telah dijalankan selama beberapa tahun kebelakang dan terlaksana secara berkelanjutan walaupun ada beberapa program yang sempat terhenti.

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, Program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Desa Kesumbo Ampai dari tahun ke tahun selalu tersedia baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun pihak Swasta lainnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara 5 indikator menurut Zubaedi (2013: 76) diatas maka dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sudah mulai membaik selama program tersebut berlanjut. Program bantuan tersebut tak hanya didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis melainkan pihak swasta juga membantu dalam pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kesumbo Ampai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

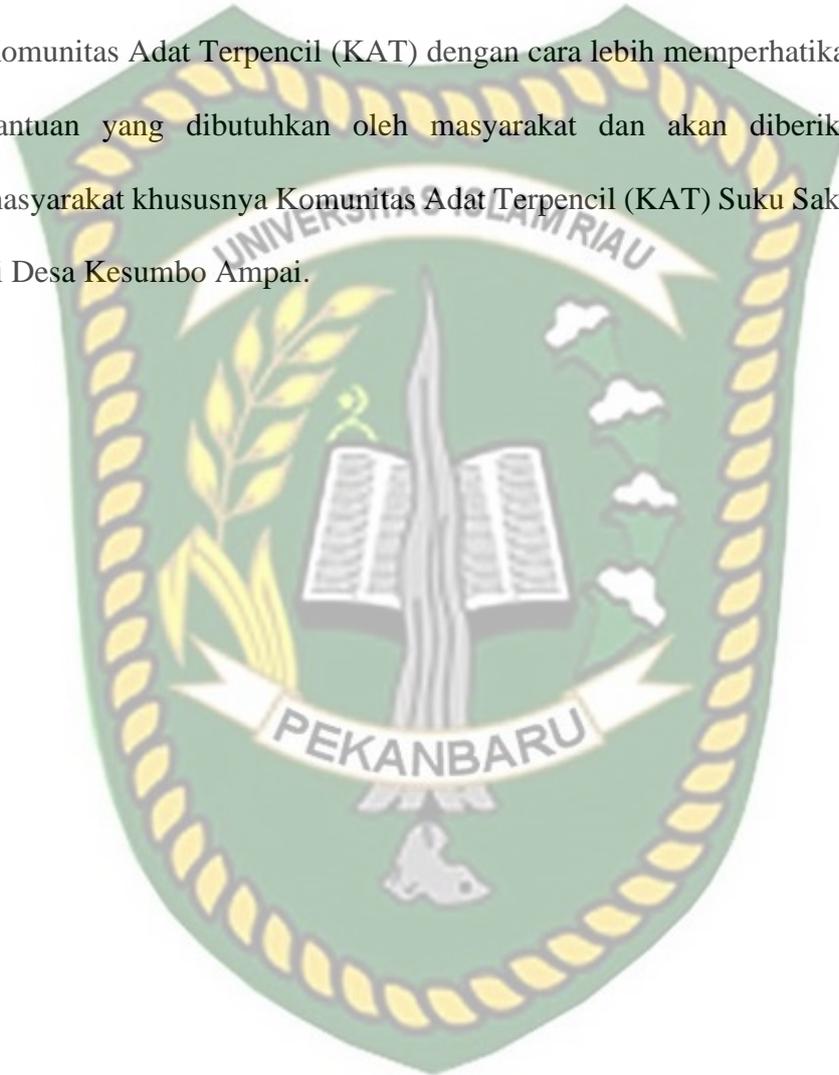
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Komunitas Adat Terpencil di Desa Kesumbo Ampai sudah mulai diberi bantuan berupa bantuan ekonomi dari Pihak Pemerintah Kabupaten dan Pihak Swasta. Artinya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup peduli terhadap kesejahteraan Masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai walaupun beberapa tahun terakhir program pemberdayaan sempat tertunda. Masyarakat merasa senang dan puas apabila program Pemberdayaan tersebut akan dilaksanakan Kembali pada tahun ini.
2. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis sudah menyalurkan beberapa bantuan ekonomi, pendidikan dan Kesehatan kepada masyarakat Suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan tetapi beberapa masyarakat ada yang merasa bahwa bantuan tersebut masih belum merata. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga sudah menyediakan web agar masyarakat dapat mengakses dan melihat bantuan yang diberikan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Desa Kesumbo Ampai dari tahun ke tahun selalu tersedia baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun pihak Swasta lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diberikan saran kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Diharapkan dapat meningkatkan program pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan cara lebih memperhatikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan akan diberikan kepada masyarakat khususnya Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai yang ada di Desa Kesumbo Ampai.



Daftar Pustaka

Buku:

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Faried & Andi Syamsu Alam. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.

Arikunto, S. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bima Aksara.

Bado, Basri. 2022. *Metode Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Klaten: CV. Tahta Media Group.

Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Damanik, S. Efratani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Gora, Radita. 2019. *Riset Kualitatif Public Relation*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.

- Haboddin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Kansil, dan Christine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong. Lexy J. 2018. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Rasyid, Ryaas, M. 1996. *Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rohayatin, Titin. 2021. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: KENCANA

Jurnal:

Bakar, Abu dan Abd. Ghofur. 2017. “*Problematika Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis*”. *Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 9(1), 91-113.

Nurgiansah, T. Heru. 2018. “*Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*”. *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 63-78.

Renaldi. 2020. “*Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Terhadap Suku Sakai Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahun 2016-2018*”. *Jurnal JOM Fisip*, 7(2), 1-12.

Rizka Eliza, Febi dkk. 2018. “*Peran Pemerintah Terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SAD) Di Provinsi Jambi Tahun 2018*”. *Jurnal Kesmas Jambi*, 2(1), 40-49.

Sujarwani, Riau dkk. 2018. *“Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau”*. *Jurnal Antropologi*, 20(1), 17-31.

Skripsi:

Putri Della, Maiyoza. 2018. *“Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Memperdayakan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Bengkalis”*. (Skripsi). Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau.

Internet:

https://riau.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/5.-KABUPATEN-BENGKALIS-FULL_compressed-min.pdf

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/visi-dan-misi/3>

Dokumentasi:

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam bidang Pemberdayaan Sosial terdapat pada Pasal 17 Ayat (1)

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial
Terhadap Komunitas Adat Terpencil.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau